

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia ekonomi dividen merupakan total seluruh laba bersih yang telah dikurangi penyisihan untuk cadangan pajak yang akan dibagikan kepada pemegang saham (pemilik modal) dengan kata lain tidak ada ketentuan apapun dari rapat umum pemegang saham yang bisa mempengaruhi besaran pembagian dividen kepada pemegang saham, pendapatan yang akan di dapat dari pemegang saham adalah hasil dari pembagian dividen atau biasa di kenal dengan kebijakan dividen.

Pembagian dividen untuk pemegang saham terbagi dua yaitu pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa, yang mana dalam pembagian dividen pemegang saham preferenlah yang lebih diutamakan, hak-hak yang lebih diutamakan (didahulukan) tersebut adalah hak untuk mendapatkan dividen dan hak untuk mendapatkan pembagian aset sebagai hasil likuidasi (pembubaran) perusahaan.

Kebijakan dividen merupakan salah satu kewajiban lancar jika pada tahun tertentu pemegang saham preferen tidak mendapatkan pembagian dividen, maka pemegang saham preferen berhak untuk mendapatkan di tahun mendatang (Nugraheni & Mertha, 2019).Alat-alat pembayaran yang diperlukan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tersebut harus bernilai lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Kebijakan dividen menurut Martono dan Harjito (2003) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan.

Isu pada PT Betonjaya Manunggal Tbk ([BTON](#)) yaitu perencanaan investasi baru, namun di sebabkan oleh beberapa hal sepertinya belum direncanakan investasi baru tahun depan. Makanya hingga kini produsen besi dan baja tersebut tidak menganggarkan dana

belanja modal atau *capital expenditure* (capex) untuk investasi di 2021. BTON berdalih masih memantau perkembangan ekonomi dan pasar baja beton dalam negeri. "Semoga tahun depan lebih baik, sehingga utilisasi meningkat dan otomatis menghasilkan laporan lebih baik secara keseluruhan," ujar Andy Soesanto, Direktur PT Betonjaya Manunggal Tbk kepada KONTAN, Jumat (11/12). Betonjaya Manunggal Tbk ([BTON](#)) membukukan penjualan sebesar Rp122,33 miliar hingga 31 Desember 2019, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp117,49 miliar. Namun, laba bersih perseroan turun menjadi Rp1,37 miliar pada 2019 dari laba bersih sebesar Rp27,81 miliar pada 2018. ([www.britama.com](http://www.britama.com))

Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan penting perusahaan dan merupakan bagian integral dari keputusan pembelanjaan perusahaan, pentingnya kebijakan dividen adalah karena laba ditahan merupakan sumber dana internal terbesar dan terpenting bagi pertumbuhan perusahaan. Jadi ketika dalam sebuah perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan maka dividen yang didapatkan juga akan besar . Ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan atas keuntungan yang diraih tersebut :

1. Laba dibagikan kepada para pemegang saham (dividen)
2. Laba digunakan kembali untuk kegiatan dan ekspansi usaha ([laba ditahan](#))
3. Laba dibagi antara dividen dan sebagian lagi digunakan untuk laba ditahan.

Penting bagi perusahaan dalam membayarkan dividen kepada pemegang saham, karna jika perusahaan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham, maka perusahaan dapat melihat kinerja dan kualitas nilai perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana interen atau *internal financing*. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana interen akan semakin besar.

Adapun mekanisme pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

Declaration date adalah hari dimana dewan direksi perusahaan mengumumkan pembayaran dividen, Ex-Dividend Date adalah dua hari sebelum tanggal pencatatan, dan ditetapkan siapa saja yang mendapatkan pembayaran dividen, Date record adalah tanggal pencatatan dimana seluruh pemegang saham harus tercatat untuk menentukan daftar penerima dividen, dan yang terakhir date of Payment adalah tanggal dimana cek telah dikirimkan kepada pemegang saham.

Menurut (Halim,2005:94) ada beberapa bentuk pembayaran dividen:

- ✓ Dividen dalam jumlah Rupiah stabil yaitu Banyak perusahaan menjalankan kebijakan pembayaran dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Pembayaran dividen yang stabil ini dapat memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa datang.
- ✓ Dividen dengan rasio pembayaran konstan yaitu beberapa perusahaan melakukan pembayaran dividen berdasarkan presentase tertentu dari laba. Karena laba berfluktuasi, maka menjalankan kebijakan ini akan berakibat jumlah dividen dalam rupiah akan berfluktuasi. Kebijakan ini tidak akan memaksimalkan nilai saham perusahaan, karena pasar tidak mengandalkan kebijakan ini untuk memberikan informasi tentang perusahaan di masa akan datang.
- ✓ Dividen tetap yang rendah ditambah ekstra yaitu pembayaran dividen ini hanyalah merupakan modifikasi dari cara 1 dan 2 diatas. Kebijakan ini memberi fleksibilitas pada perusahaan tetapi mengakibatkan investor sedikit ragu-ragu tentang besarnya dividen mereka. Apabila laba perusahaan sangat berfluktuasi, kebijakan ini akan merupakan pilihan terbaik.

Apabila manajemen perusahaan mengambil laba dibagikan sebagai dividen, maka sumber pendanaan internal akan berkurang. Laba di tahan berkurang, demikian juga sebaliknya apabila perusahaan memilih opsi untuk tidak membagikan dividen, maka dana internal perusahaan akan membesar. Laba ditahan adalah salah satu sumber pendanaan perusahaan yang sangat penting untuk digunakan dalam membiayai pertumbuhan perusahaan, semakin besar laba ditahan maka akan semakin kuat struktur modal dan posisi keuangan perusahaan. Semua langkah yang diambil dalam kebijakan dividen adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus tetap memperhatikan tujuan utama perusahaan yaitu kesejahteraan pemilik perusahaan dan meningkatkan nilai dari perusahaan. Jika sumber dana yang dibagikan kecil maka perusahaan akan membayarkan sisa pembayaran dividen di tahun yang akan datang

Kebijakan dividen penting untuk diketahui oleh investor karena investor menganggap dividen tidak hanya merupakan sumber penghasilan tetapi juga cara untuk menilai suatu perusahaan dari sudut pandang titik investasi (Wiagustini,2014:286). Tanggung jawab perusahaan dalam pembagian dividen di pengaruhi oleh besaran uang yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan menganggap kewajiban/utang lebih penting dari pada aktifitas pendanaan lain, yang akan berpengaruh juga pada pembagian dividen.

Pembagian dividen menjadi pertimbangan karena akan berpengaruh pula kepada pembiayaan investasi pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengoptimalkan kebijakan dividen yang dilakukan serta memikirkan faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi (Yasmita dan Jumlah dividen yang dibagikan perusahaan bergantung dari kebijakan atau aturan yang ditetapkan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda karena belum adanya aturan yang

mengatur mengenai besaran kebijakan dividen yang harus dibayarkan. Keputusan mengenai apakah perusahaan akan membagikan dividen atau tidak, serta besaran dividen yang akan dibayarkan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Widanaputra, 2018), (Nugraheni & Mertha, 2019).

Menurut Harjito dan Martono (2013) kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Pamungkas, Ruserlistyani, & Janah, 2017).

Informasi atau proses pencatatan transaksi suatu perusahaan yang mana mencerminkan kinerja sebuah perusahaan disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan memang berperan penting dalam pengambilan keputusan, dengan melihat pelaporan keuangan, sebuah perusahaan dapat mengambil keputusan untuk dapat membagikan dividennya.

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan (Horne dan Wachowicz, 2013:206). Dividen pada dasarnya merupakan bagian dari laba perusahaan yang akan dibagikan kepada pemilik perusahaan atau investor (Nabela, 2012:2). Menurut Trisnabudi dan Fitria (2015:4) kebijakan dividen adalah penentuan alokasi laba yang sesuai antara pembayaran laba sebagai dividen dengan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan, Yulianto (2013:177) menyatakan kebijakan dividen adalah keputusan mengenai seberapa banyak laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dan seberapa banyak yang dipergunakan untuk investasi perusahaan, (Yanuarti, 2018)

Kebijakan dividen perusahaan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setidaknya ada 8 hal yang harus diperhatikan perusahaan sebelum menetapkan kebijakannya. Ke-8 faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain:

1. Posisi Likuiditas Perusahaan
2. Kebutuhan Dana untuk Membayar Utang
3. Tingkat Ekspansi Aktiva
4. Stabilitas Laba
5. Peraturan Hukum Perundang-undangan
6. Pengendalian Perusahaan
7. Pembatasan dalam Perjanjian Utang
8. Kemampuan untuk Meminjam

Fenomena yang terdapat pada [PT Beton jaya Manunggal Tbk \(BTON\)](#) memprediksi penjualan di akhir tahun 2020 menurun kisaran 5%-10% dibandingkan periode serupa tahun lalu disebabkan pelambatan bisnis properti imbas pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Andy Soesanto, Direktur PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) dalam laporan hasil public expose yang dipublikasikan pada Senin (14/12). "Manajemen masih berusaha mencapai target penjualan, namun bila kondisi tidak memungkinkan, maka realiasinya akan lebih rendah kisaran 5%-10% dari yang ditargetkan," katanya. Dikatakannya penjualan hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar Rp 122,3 miliar. Sedangkan per September 2020, realisasi penjualan sebanyak Rp 84,49 miliar, lebih rendah dibandingkan periode serupa tahun lalu sebanyak Rp 85,33 miliar. Meskipun pendapatan sedikit mengalami penurunan di September 2020, namun kinerja laba naik dibandingkan periode serupa tahun lalu sebesar Rp 3,39 miliar. "Ini karena ada pendapatan selisih kurs," tuturnya. (LK). ([www.revenues.com](http://www.revenues.com)).

Konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali merupakan konflik keagenan yang secara kontekstual merupakan konflik utama di negara berkembang dengan perusahaan yang memiliki karakteristik kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan tidak langsung, dan pemegang saham yang terlibat dalam manajemen (Siregar, 2011). Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang mampu melindungi

kepentingan pemegang saham nonpengendali. Salah satu tata kelola perusahaan yang dapat mengawasi perusahaan dan melindungi kepentingan investor adalah dengan menempatkan komisaris independen untuk mengawasi manajer dan melindungi pemegang saham nonpengendali. (Perwira & Ratnaningsih, 2017).

Kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menentukan berapa besarnya laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa laba yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Pembagian dividen merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mendistribusikan kemakmuran kepada para pemilik saham (Santoso, 2012), (Auditor, Hutang, Setiawan, Nur, & Yuyetta, 2013).

Menurut (Sukrisno dan Cenik, 2014:110) komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata – mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan, (Jurnal, 2013). Independensi dewan komisaris adalah salah satu mekanisme efektif dalam mengawasi proses akuntansi. Di samping anggota dewan komisaris dengan kekuasaan eksekutif, dewan komisaris harus juga terdiri dari anggota independen, yaitu komisaris independen atau non eksekutif (Johari dkk, 2008), (Auditor et al., 2013).

Peran komisaris independen di Indonesia sangat penting, karena perusahaan publik di Indonesia banyak yang dikuasai oleh satu pemegang saham mayoritas, sedangkan sisanya dikuasai oleh investor minoritas yang kurang memiliki akses informasi ke manajemen perusahaan. Pemegang saham minoritas tersebar sehingga tidak terwakili dalam pengambilan keputusan (Ginting, 2015). Oleh karena itu, komisaris independen diharapkan dapat menjadi perantara bagi investor minoritas dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga sumber daya yang ada dalam perusahaan dapat digunakan dengan efisien dan efektif, (Perwira & Ratnaningsih, 2017). Direktur Independen atau anggota dewan

direksi bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan, Sedangkan Komisaris Independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas perusahaan.

Selain itu, Fama dan Jensen (1983) dalam Atmaja (2010:131) menyatakan dewan komisaris memiliki peran dalam mengontrol masalah keagenan, terutama memonitor manajemen eksekutif. Untuk menjamin dewan komisaris bekerja secara efektif maka dimasukkannya komisaris independen (Pratiwi dan Yulianto, 2016:217). Pemegang saham terbesar adalah pengendali perusahaan. Kendali yang besar memudahkan para pemilik mengontrol berbagai kebijakan strategis, seperti strategis pendanaan (Hasnawati dan Sawir, 2015:65).

Nuraina (2012:56) menyatakan bahwa pemegang saham institusional biasanya memiliki porsi kepemilikan yang besar dalam perusahaan. Menurut Kasmir (2012:158) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan seluruh kewajibannya (baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang). Manajemen dalam kebijakan dividennya akan sangat dipengaruhi dengan besaran utang yang harus ditanggung oleh perusahaan, manajemen menganggap kewajiban perusahaan lebih penting dari pada aktifitas pendanaan lain, yang berpengaruh juga pada pembagian porsi dividen yang akan dibagikan perusahaan, (Amanah lailatul, 2020). Sebagai pihak pemegang saham mayoritas, investor institusional memiliki hak yang besar atas kendali perusahaan. Nuraina (2012:56) juga menyatakan bahwa pemegang saham menghendaki adanya pihak ketiga yaitu debtholder yang ikut memonitori kinerja manajemen, (Yanuarti, 2018).

Sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan meliputi sumber dana internal dan eksternal (Sutapa dkk, 2008:22). Dana yang berasal dari sumber internal berupa aliran kas, laba ditahan dan depresiasi (Nilmawati, 2009:40). Sedangkan, dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan investor. Dana yang berasal

dari kreditur disebut modal asing yang merupakan hutang bagi perusahaan sedangkan dana yang berasal dari investor disebut modal sendiri (Nurrohim KP, 2008:11), (Yanuarti, 2018).

Pihak pemilik modal atau pemegang saham menginginkan agar laba ditahan dibagikan dalam bentuk dividen dengan harapan jika perusahaan membagikan dividen, nilai perusahaan akan meningkat dari sudut investor, sehingga nilai sahamnya akan mengalami kenaikan (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012:12), (Yanuarti, 2018).

Struktur kepemilikan pengendali di Indonesia dapat dikategorikan menjadi kepemilikan pengendali oleh pihak keluarga, pihak pemerintah, dan investor asing (Setiawan et al, 2016). Berdasarkan hasil survey bisnis keluarga yang dilakukan Price Waterhouse Coopers (2014), perusahaan keluarga menguasai 95 persen bisnis di Indonesia. Selain perusahaan keluarga, terdapat perusahaan dengan struktur kepemilikan lainnya yang bertumbuh pesat dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan yang dimiliki investor asing (Carney dan Child, 2013). Oleh karena itu, struktur kepemilikan pengendali di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan asing, (Perwira & Ratnaningsih, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan dividen telah dilakukan sebelumnya. Wijayanti (2014), menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hasil serupa ditemukan oleh Ginting (2015) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, komisaris independen merupakan salah satu elemen tata kelola perusahaan yang mampu melindungi kepentingan pemegang saham non-pengendali, (Perwira & Ratnaningsih, 2017). Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting di dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang

dan equity tetapi juga oleh persentase kepemilikan oleh manajer dan institusional (Jensen dan Meckling, 1976). (Rusli & Sudiarta, 2017). Penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan keluarga, pemerintah, dan investor asing terhadap kebijakan dividen sudah pernah dilakukan sebelumnya di negara-negara lain dan di Indonesia. Menurut Gonzales et al. (2014) keterlibatan keluarga dalam struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Bradford et al. (2013), juga menemukan hasil yang sama, struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Penelitian Setiawan et al. (2016) juga menemukan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur kepemilikan pemerintah dan investor asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan Bokpin (2011) juga menemukan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, (Perwira & Ratnaningsih, 2017). Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan tahun penelitian yang lebih up to date serta terdapat perbedaan objek dan waktu penelitian dengan harapan dapat meningkatkan pembaruan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan nanti.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengambil judul **“Peran Dewan Komisaris Independent dalam Memperkuat Hubungan Antara Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode2015-2019).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan dividen?
2. Apakah Dewan Komisaris independen berpengaruh terhadap kebijakan dividen?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen memperkuat hubungan antara Struktur Kepemilikan dengan kebijakan dividen?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari:

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap kebijakan dividen
3. Untuk mengetahui dewan komisaris independen memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan dengan kebijakan dividen

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi perkembangan dunia akademik, penelitian diharapkan agar bermanfaat bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Kebijakan Dividen sehingga menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian selanjutnya dan menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan sebelumnya.

2. Bagi Investor, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemegang saham dalam mengambil keputusan karna kenaikan harga saham dan pembagian dividen adalah hal yang di harapkan oleh pemegang saham.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Berikut ini sistematika dalam peneltian yang terdiri dari beberapa sub-sub bab:

- Bab I yaitu menjabarkan tentang pendahuluan yang mana berisikan latar belakang yang berhubungan dengan variabel bebas (ukuran dewan, direktur independen, kepemilikan keluarga) dan variabel terikat (kebijakaan dividen), serta menjelaskan fenomena yang berkaitan tentang kebijakan dividen. di susul dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kemudian sistematika penulisan.
- Bab II berisikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis, bab yang menjelaskan tentang teori-teori, dasar pemikiran dan penelitian sebelumnya serta pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran yang merupakan isi bahasan dari penelitian
- Bab III bab ini membahas tentang populasi dan sampel yang di gunakan dalam peneltian ini, serta jenis data apa yang di pakai dalam penelitian dan arti dari variabel-variabel di dalam penelitian seperti: variabel dependen (varibabel terikat), variabel independen (variabel bebas) ,bab ini juga menjelaskan tentang pengukuran variabel dan teknik pengujian data yang digunakan.

Bab IV berisikan tentang Analisa hasil dan Pembahasan, yang akan membahas tentang bagian umum objek penelitian yang berisi penjelasan secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis data yang bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan pembahasan yang lebih luas serta implikasi dari hasil analisis

Bab V Penutup, dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi penelitian selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian.